

## Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode di Media Massa terhadap Sikap Publik

Radita Gora<sup>1</sup>, Yuri Alfrin Aladdin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Jakarta, Indonesia

e-mail: [raditagora@upnvj.ac.id](mailto:raditagora@upnvj.ac.id)<sup>1\*</sup>; [yuri.aa@lspr.edu](mailto:yuri.aa@lspr.edu)<sup>2</sup>

\*Corresponding author

### ABSTRACT :

The issue of extending the President's term of office to three terms has become very strong along with the issue of postponing the 2024 Election circulating in the community, which has then invited controversy in society and also massive coverage in the mass media, including hot discussions on social media. The media has a big role to influence public attitudes. So, through the Inoculation theory, we attempt to examine explanatively the issue of extending the presidential term of office in the media on public attitudes using a quantitative approach. Based on the research results, it shows that there is an influence between the issue of extending the President's term of office and postponing the 2024 Election on public attitudes which show disapproval of these two issues. The public believes that extending the presidential term of office and postponing elections is a violation of the constitution and also creates a sense of distrust among respondents towards the current government. Apart from that, respondents also linked the two issues circulating in the mass media and online media to the interests of IKN and also considered that the government was not functioning well in accordance with the mandate of the constitution.

### ARTICLE HISTORY

Submitted: 14 October 2023

Revised: 2 January 2024

Accepted: 26 January 2024

### KEYWORDS

extension of presidential term, mass media, postponement of elections, public attitudes

## PENDAHULUAN

Variasi isu-isu politik menjelang Pemilu kerap kali diwarnai dengan beragam pernyataan kontroversial terutama ketika ada figur individu, kelompok ataupun partai yang mendukung kandidat yang menjadi Presiden ataupun rivalnya, tentu berupaya untuk mempertahankan kekuasaan kelompok dengan mempertahankan kekuasaan Presiden yang didukungnya. Upaya untuk membangun dasar kepentingan politik antar partai yang bersifat oposisi ataupun

partisan, maka perlu ada andil yang dilakukan antar aktor politik menciptakan isu-isu baru yang didistribusikan dan disampaikan secara persuasif agar masyarakat ikut terpola dengan pendapat oleh pihak meski melanggar beberapa aturan baku.

Adanya aktor yang menyebarkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode dan penundaan pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada 2024 untuk ditunda hingga waktu yang belum jelas ditentukan. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang mengatakan bahwa terdapat pihak yang berupaya mengegolkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden ataupun Jokowi tiga periode. Tetapi, Pramono menampik kalau upaya-upaya itu menemukan sokongan istana (Sukimin, 2020).

Isu mengenai jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 tentu dinilai oleh berbagai pihak telah melanggar ketentuan konstitusi. Hal ini dituliskan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, warga negara wajib memegang teguh dan melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sedangkan pada Pasal 7 UUD 1945 disebutkan masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya dua periode. Selain itu perpanjangan masa jabatan Presiden juga dinilai bahwa demokrasi di Indonesia akan rapuh dan akan mengalami kemunduran ke masa orde baru (Rauf & Rado, 2022).

Jabatan Presiden sudah diemban pasca pemilu 2019, yang pada pemilu ini ambang batas parlemen disepakati naik, dari 3,5% menjadi 4% meskipun perdebatan sengit tak terlewatkan dalam pembahasan RUU Pemilu. Skema dalam pemilihan partai politik dan pemilihan Presiden dilakukan secara serentak dan tetap dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang (Hanafi, 2021).

Isu perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode begitu bergulir kencang di lingkup kelompok Kepala Desa. Pernyataan Pimpinan Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI, Surtawijaya yang menunjang wacana Jokowi tiga periode menuai polemik sebab posisi kepala desa yang dinilai memiliki pengaruh politik yang lumayan kokoh untuk masyarakatnya. Tidak hanya itu, selaku pejabat pemerintahan, kepala desa tidak boleh ikut serta dalam aplikasi politik instan (Riady & Syugiarto, 2022).

Bentuk distribusi pesan dan isu-isu tiga periode ditayangkan secara agresif untuk pihak-pihak tertentu terutama melalui media sosial dan menjadi pemberitaan di media massa. Tidak lain bahwa isu ini ditujukan untuk menciptakan sikap publik agar mendukung perpanjangan masa Presiden tersebut. Namun di satu sisi publik sendiri belum terlihat sikapnya dalam menyikapi hal tersebut (Louise Ahlstrand, 2021).

Menurut hasil peliputan dari majalah Tempo yang dituliskan pada kolom opini, menemukan fakta bahwa pernyataan-pernyataan mendukung penundaan pemilu diorkestrasi oleh orang-orang kepercayaan Jokowi. Satu diantaranya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden sebelumnya dikaji di Laboratorium Indonesia 2045. Bekas Menteri Sekretaris Kabinet yang kini menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Widjajanto, tercatat sebagai penasihat senior lembaga itu. Skenario yang dituliskan pada Tempo ini yang dipersiapkan, Jokowi menjabat tiga periode dan penundaan pemilu selama tiga tahun, satu tahun, atau setidaknya delapan bulan. Jalan yang akan dipakai adalah amandemen konstitusi.

Isu yang beredar luas mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden akan diajukan bersamaan dengan rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara, bentuk lain dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menguasai 74 persen kursi di MPR, pemerintah dan partai pendukungnya tak sulit menjalankan amandemen itu (Ni'am, 2023).

Kontroversi terhadap isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dinilai oleh sebagian pengamat politik dan akademisi yang dituangkan pernyataannya di berbagai media massa, dinilai sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi dan cita-cita reformasi. Pembatasan masa jabatan presiden dilakukan dengan asumsi kekuasaan yang tak dibatasi akan korup dan kehilangan kontrol. Upaya "kecil" untuk memperpanjang masa kekuasaan sekedar menunda pemilu selama delapan bulan atau tiga tahun merupakan pintu masuk bagi kekuasaan tanpa batas waktu (Riady & Syugianto, 2022).

Masyarakat banyak yang menganggap bahwa perpanjangan masa periode jabatan Presiden sudah melanggar konstitusi dan juga pentingnya perjalanan demokrasi bagi rakyat perlu dipenuhi. Hal ini mengingatkan perjalanan demokrasi dengan dinamika yang tak menentu menjadikan proyek kenegaraan dan kebangsaan belum menemukan titik terang. Seringkali penerapannya meluluhlantakkan keutuhan nilai-nilai yang menjadi perekat solidaritas sosial. Masyarakat seolah-olah dipaksa mengikuti praktik demokrasi, terutama pada momen pemilu dengan kampanye besar-besaran, tanpa dituntut mengerti substansi dasarnya (Bakti, 2017).

Sejauh ini, berdasarkan survei terhadap masyarakat mengatakan sebagian besar responden tak menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden betapapun mereka mengaku puas atas kinerja pemerintah. Seperti dikatakan oleh Direktur LSI, Djayadi Hanan "Masyarakat yang puas dengan presiden, mayoritas sekitar 60 persen atau lebih menyatakan lebih memilih untuk tetap melaksanakan pemilu tahun 2024 dan Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024." (Tempo.co, 2022)

Penyebaran isu yang paling mudah dilakukan untuk bisa mempersuasi khalayak luas ini dengan menggunakan media massa ataupun media sosial. Media massa tidak dapat mengindahkan kemungkinan bahwa media lebih berpengaruh dalam aspek tertentu dalam krisis atau untuk meningkatkan kesadaran (Zaman & Misnan, 2021).

Efek media adalah konsekuensi dari apa yang media massa perbuat, baik disengaja maupun tidak. Di sisi lain, ekspresi 'kekuatan media' merujuk pada potensi umum dalam hal media memiliki efek terutama efek terencana. Keefektifan media adalah pernyataan tentang keefektifan media dalam mencapai tujuan tertentu dan selalu menyiratkan maksud atau tujuan komunikasi yang terencana (McQuails, 2010).

Media juga mempengaruhi berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi dan budaya. Hal ini mengingatkan media seperti halnya media *online* yang berada di antara keberadaan internet sebagai media baru memberikan kekuatan yang besar untuk mempengaruhi pembaca atau audiensnya, sehingga mempengaruhi pula kepada proses produksi, konsumsi, dan distribusinya (Bakti, 2017).

Survei dari beberapa Lembaga seperti Parameter Politik Indonesia, kemudian SMRC, LSI dan beberapa survei lainnya (CNN, 2022) hanya menunjukkan, puas atau tidak puas

masyarakat dengan kinerja presiden, termasuk hanya sebatas menolak jabatan presiden tiga periode tapi tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau tingkat penerimaan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden, sehingga hal ini masih belum ketidak korelasi tersebut, dan sikap apa yang paling berpengaruh dari penolakan masyarakat terhadap penundaan presiden. Oleh karena itu, perlu diteliti dan ditelaah kembali analisis korelasi dan faktor yang paling berpengaruh dari isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terutama terkait dengan pengaruh pesan isu media massa maupun media sosial terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan disini dapat dibangun rumusan masalah aspek kajian penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan (Pin dkk, 2021) mengenai kajian Presiden tiga periode dengan pendekatan deskriptif dalam perspektif hukum tata negara serta lebih banyak menitikberatkan pada penelitian tentang jabatan presiden tiga periode berdasarkan studi kasus dan *literature review* dengan tidak melihat dari objek masyarakat sebagai responden terhadap masa jabatan presiden, serta tidak ada yang mengukur tingkat pengaruh dan sikap masyarakat secara eksplanatif terhadap isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak mendekati pada penelitian kualitatif seperti halnya pada penelitian dari Rizal Saputra (Saputra & Claretta, 2023) yang menelaah Presiden tiga periode dari perspektif resepsi penerimaan khalayak. Selain itu juga beberapa penelitian terdahulu masih minim menelaah kajian isu jabatan Presiden tiga periode sebelumnya terkait faktor dari variabel isu yang berpengaruh terhadap sikap publik dan lebih banyak mengkaji dari perspektif hukum, politik dan ketatanegaraan namun belum ada yang memfokuskan pada kajian komunikasi.

Adapun pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden terhadap sikap publik serta korelasinya? Kemudian faktor apa yang paling berpengaruh dari isu perpanjangan masa jabatan presiden terhadap sikap publik? Sehingga tujuan yang diharapkan dapat memperoleh pengetahuan berupa temuan hubungan pengaruh serta faktor yang dominan dalam mempengaruhi sikap publik. Selain itu manfaat yang diperoleh adalah untuk temuan akademis maupun temuan praktis terkait dengan riset media dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori efek dengan model Inokulasi. Proses manapun dalam efek media pada individu harus dimulai dengan perhatian atau terpaan pada pesan di media. Acuan dasar dari teori ini adalah pesan tunggal – individu penerima – reaksi (feedback). Acuan dasar dari model efek ini adalah model S (*Sending*), M (*Medium*), C (*Channel*), R (*Receiver*), dan E (*Effect*) (Rakhmat, Jalaluddin; Ibrahim, 2017).



pakar, buat pengaruhi perilaku, komentar serta sikap seorang, baik secara verbal ataupun nonverbal (Littlejohn, Stephen W. & Foss, 2009).

Konsep-konsep dalam persuasi meliputi wujud dari proses komunikasi yang bisa memunculkan pergantian, dicoba secara sadar ataupun tidak sadar, dicoba secara verbal ataupun non verbal. Faktor- faktor yang wajib dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi meliputi kejelasan tujuan, memikirkan secara teliti orang- orang yang dialami, dan memilih strategi yang pas. Ruang lingkup kajian ilmu komunikasi persuasif meliputi sumber, pesan, saluran/ media, penerima, dampak, umpan balik, serta konteks situasional. Pendekatan yang digunakan dalam komunikasi persuasif merupakan pendekatan psikologis. 3 guna utama komunikasi persuasif merupakan *control function*, *consumer protection function*, serta *knowledge function* (Perloff, 2007).

Teori inokulasi terdiri dari dua elemen dasar, yaitu *threat* dan *refutational preemption*. *Threat*. dalam teori inokulasi mengacu pada peringatan akan kemungkinan serangan terhadap sikap dan kepercayaan seseorang. Orang tersebut sadar akan kerentanannya terhadap serangan persuasif. Persepsi bahwa ada ancaman yang akan terjadi secara psikologis memotivasi seseorang untuk mempertahankan keyakinan dan sikapnya (McQuails, 2010).

*Refutational preemption*. Target potensial untuk serangan persuasi seharusnya tidak hanya diperingatkan tapi pesan inokulasi juga harus mendahului tindakan balasan yang mungkin terjadi. Sambil menyiapkan pesan inokulasi, argumen yang akan diajukan pihak lain harus diantisipasi dan cara melawannya juga harus dipersiapkan (McQuails, 2010).

Bentuk dan penentuan sikap masyarakat terhadap keberadaan presiden merupakan bentuk demokrasi yang tidak serta merta dapat diterapkan di semua bentuk kehidupan tanpa didukung oleh perangkat – perangkat nilai sebagai modal sosial demokrasi. Sebab, secara kultural demokrasi merupakan sebuah sistem yang lahir dari pergulatan Panjang masyarakat Eropa yang sarat dengan nilai-nilai khas sehingga tidak dapat diadopsi begitu saja di tempat lain (Bakti, 2017).

Pada komponen sikap manusia tersusun dalam tiga komponen utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif atau perilaku. Kognitif mencakup apa yang diketahui oleh objek, bagaimana pengalaman tentang objek ini, bagaimana pendapat atau pandangan tentang objek. Aspek kognitif berkaitan dengan kepercayaan, teori, harapan, sebab dan akibat dari suatu kepercayaan, dan persepsi relatif terhadap objek tertentu. Sedangkan afektif berisi apa yang dirasakan oleh subjek mengenai suatu objek, jadi komponen afektif berisi emosi. Konatif berisi predisposisi untuk bertindak terhadap objek sehingga berisi kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. Kemudian *evaluative* sebagai inti dari ketiga komponen sikap tersebut sebagai rentangan menggambarkan derajat sikap terhadap objek (Liliweri, 2011).

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan paradigma positivis dengan mendasarkan pada data empiris secara objektif yang mengukur nilai hubungan sebab-akibat (Neuman, 2013). Pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara *online* dengan *google forms*. Jenis penelitian bersifat deskriptif dan waktu pelaksanaan

penelitian dilakukan dari bulan Maret – Mei 2022. Adapun data sekunder (pendukung) dari penelitian ini menggunakan data dasar dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), kemudian resensi dari media massa *online* dan cetak. Lokus penelitian dibatasi dengan dilakukan di wilayah Jakarta Timur dengan jumlah penduduk terpadat sampai 2021 mencapai 3.056.300 dan Survei Parameter Politik Indonesia 45.3% warga Jakarta menolak gagasan jabatan Presiden tiga periode (BPS, 2022; CNN, 2022).

Teknik *sampling* yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* yang disebar pada responden hingga menemukan jawaban atau pada titik jenuh responden. Teknik *sampling* ini dilakukan karena memperhatikan aspek kontroversi terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden mencakup semua segment masyarakat terutama usia dewasa antara 20 – 40 tahun dan menjadi isu nasional.

Pengujian instrumen data menggunakan uji validitas konstruk dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* yang menguji nilai validitas dari perbandingan rata-rata hitung dengan rata-rata tabel (Silalahi, 2017). Sedangkan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach (Siregar, 2016). Selain itu, dilakukan uji normalitas data untuk menguji data berdistribusi normal sebelum dilakukan pengujian korelasi dan regresi (Bahri, Syamsul; Zamzam, 2014).

Teknik analisis data yang dilakukan disini menggunakan uji korelasi dengan jenis korelasi Spearman untuk mengukur hubungan nilai total skor dari kedua variabel (Silalahi, 2017). Variabel X yaitu Isu perpanjangan masa jabatan presiden dan variabel Y yaitu Sikap khalayak atau masyarakat. Indikator utama dari variabel X ini diantaranya pesan media, frekuensi pesan terkait isu perpanjangan jabatan Presiden tiga periode di media massa, *Refutational preemption* yang mencakup penekanan pesan dan peringatan. Kemudian untuk indikator dari variabel Y yaitu motivasi, praktik atau tindakan, dan sikap publik yang mencakup perilaku, tanggapan, dan kepercayaan publik terhadap isu jabatan presiden tiga periode dan isu yang berkembang di media massa. Setelah uji korelasi baru kemudian dilakukan uji regresi linear sederhana yang bentuk pengujiannya pada dua variabel melalui tahapan uji korelasi, determinasi, hingga uji Anova.

Langkah pengujian berikutnya adalah analisis faktor atau menemukan faktor-faktor yang paling dominan dari variabel isu atau X terhadap variabel sikap atau Y. Analisis faktor ini dilakukan dengan menganalisis jumlah faktor, nilai *communal*, dan nilai matrix (Santoso, 2018).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh 290 responden yang terdiri dari 138 laki-laki (48%), 152 perempuan (52%) dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun pada sampel ini peneliti memprioritaskan bagi responden yang mengetahui tentang isu atau pemberitaan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang sempat beredar di media massa.

Sebanyak 91,3 % responden mengetahui tentang isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode serta penundaan pemilu 2024 sebanyak 84,3%. Kemudian 87,9 responden tidak menyetujui apabila ada kebijakan pemerintah terkait penundaan Pemilu

2024, dan 90,7% tidak menyetujui bila Pemerintah menerapkan masa jabatan Presiden hingga tiga periode. Bagi Responden sebanyak 89,3% perpanjangan masa jabatan Presiden dan menunda Pemilu merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi.

Sebanyak 92,4% responden membutuhkan sosok Presiden atau Kepala Negara yang baru. Selain itu responden berpendapat, sebanyak 79,9%, dengan masa perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode bisa melahirkan pemimpin atau kepala negara yang diktator karena ketidakberdayaan konstitusi dan hukum tata negara. Adapun responden berpendapat, sebanyak 89,3%, masa perpanjangan jabatan Presiden menyebabkan ketidakstabilan politik antara rakyat dan pemerintah.

Penundaan pemilu dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari rakyat, hal ini terbukti dari sebanyak 90% data responden yang berpendapat bahwa responden telah mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Bahkan isu penundaan pemilihan presiden atau pemilihan umum berpotensi kembali pada masa orde baru dan hal ini diyakini oleh responden sebanyak 80,6%.

Responden juga berpendapat bahwa ada keterkaitan ketertundaan Pemilu 2024 dengan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode dengan pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan. Sebanyak 68,5% responden berpendapat ada keterkaitan antara perpanjangan masa jabatan presiden dengan pembangunan IKN. Namun masih ada sikap responden yang berpendapat bahwa tidak ada keterkaitan antara perpanjangan masa jabatan Presiden dengan pembangunan IKN sebanyak 31,5%.

Menurut hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya sikap demokratis dari pemerintah untuk tetap konsisten dan menjalankan Konstitusi dan amanat Undang-Undang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menentukan: "Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun, dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa sidang yang sama."

Dasar amanat Undang-Undang mengenai ketetapan masa jabatan Presiden diharapkan tidak mengkhianati pemilih yang dimana semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka mempengaruhi dan meyakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang tak lain ada presiden terpilih (Bakti, 2017).

Berdasarkan uji validitas konstruk yang dianalisa oleh peneliti di sini, diperoleh 16 pertanyaan kuesioner yang dinyatakan valid melalui pengujian korelasi Pearson Product Moment. Terdapat 1 instrumen yang dinyatakan tidak valid karena nilai  $t$  hitung lebih rendah dibanding  $t$  tabel sehingga 1 pernyataan dari instrumen tersebut tidak digunakan. Adapun pertanyaan kuesioner yang valid ditunjukkan pada Tabel 1.

Selain pengujian instrumen melalui uji validitas, peneliti juga melakukan pengujian reliabilitas instrumen data dengan menggunakan uji Alpha Cronbach. Pengujian reliabilitas dengan Alpha Cronbach digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan 'benar' atau 'salah' maupun 'ya' atau 'tidak', melainkan digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes mengukur sikap atau perilaku. Pengujian reliabilitas ini merupakan koefisien yang umum untuk mengevaluasi *internal consistency*. Pengujian Reliabilitas disini peneliti menemukan nilai pengujian Alpha Cronbach sebesar 0.729618444,



sedangkan nilai Alpha 0,2. Dengan kata lain, nilai Cronbach Alpha lebih besar sehingga instrumen dinyatakan reliabel untuk dilanjutkan pada uji korelasi hingga regresi.

**Tabel 1 Hasil Uji Validitas**

Instrumen	T table	T hitung	Status Validitas
X1.1	0,138	0.7182509	Valid
X1.2	0,138	0.800175718	Valid
X1.3	0,138	0.837475878	Valid
X1.4	0,138	0.311695791	Valid
X1.5	0,138	0.787876372	Valid
Y1.1	0,138	0.485237644	Valid
Y1.2	0,138	0.525151253	Valid
Y1.3	0,138	0.393638862	Valid
Y1.4	0,138	0.462308468	Valid
Y1.5	0,138	0.587994294	Valid
Y1.6	0,138	0.549559638	Valid
Y1.7	0,138	0.326742378	Valid
Y1.8	0,138	0.522373193	Valid
Y1.9	0,138	0.361176146	Valid
Y1.10	0,138	0.522373193	Valid
Y1.11	0,138	0.361176146	Valid

Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)

Pengujian normalitas data di atas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro Wilk yang merupakan pengujian sebaran data dan koreksi pada pengujian masing-masing sampel. Berdasarkan hasil uji normalitas data ditemukan nilai pada Asymp.Sig. sebesar 0,000 ada variabel X dan Y. Sehingga pada hipotesis pengujian menjelaskan Jika sig <  $\alpha$  (0,05) maka Ho ditolak, H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi nilai variabel X dan Y tidak berdistribusi normal.

**Tabel 2 Normalitas Data**

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TOTALX	.158	290	.000	.927	290	.000
TOTALY	.153	290	.000	.888	290	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)

Adapun pengujian korelasi menggunakan Korelasi Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif jika data variable bebas dan variabel terikat tidak berdistribusi normal, tidak memiliki varian yang sama (tidak homogen), menggunakan skala pengukuran berbentuk ordinal. Berikut rumus korelasi rank Spearman. Mencari nilai Koefisien korelasi Rank Spearman yang menghitung beda ranking antara dua

pengamatan berpasangan, dihitung dari jumlah sampel. Di sini melihat korelasi dari total skor X terhadap Y (Riadi, 2016).

Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan/menaksir Y. Ramalan pada dasarnya merupakan perkiraan/taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian (nilai variabel untuk waktu yang akan datang) sehingga melalui uji hubungan antar variabel (korelasi) memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui sesuatu di luar hasil penyelidikan (Supranto, 2018).

Berdasarkan pada uji korelasi, ditemukan *score* hubungan total X dengan total Y sebagai berikut:

**Tabel 3 Uji Korelasi**

	Total X	Total Skor Y
Total X	1	
Total Skor Y	0.563906129	1

Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)

Bila dilihat dari hasil uji korelasi menyatakan bahwa terdapat hubungan X (isu presiden tiga periode di media) terhadap Y (Sikap Masyarakat) namun tingkat hubungan tersebut dinyatakan cukup, dengan nilai skor 0,563906129. Hal ini menunjukkan bahwa isu terkait presiden tiga periode tersebut juga mendapat tanggapan dari publik terutama dalam hal publik memberikan pernyataan dan sikapnya terkait isu yang beredar di tingkat pemerintah hingga masyarakat.

Bila memperhatikan output hasil analisis korelasi di atas diperoleh korelasi X dengan Y sebesar 0,563906129 dengan nilai signifikansi 0,000 demikian juga sebaliknya. Sehingga pernyataan pengujian hasil analisis korelasi nilai Sig. lebih besar daripada 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi antara X dengan Y terdapat korelasi Signifikan.

**Tabel 4 Uji ANOVA**

ANOVA					
	<i>Df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1.00	1222.81	1222.81	132.21	0.00
Residual	287.00	2654.42	9.25		
Total	288.00	3877.24			

Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)

Selanjutnya, persamaan regresi ini perlu diuji signifikansinya dengan cara melihat nilai F dan nilai Sig. nya berdasarkan output pada tabel ANOVA. Berdasarkan output analisis data ANOVA diperoleh F sebesar 132.21 dengan Sig.0,00. Pada pengujian ANOVA menunjukkan nilai signifikansi pada skor tabel menunjukkan Sig. 0,00 yang artinya terdapat perbedaan signifikan pada hasil pengujian data (Riadi, 2016) yang dapat dilihat dari tabel 4.

**Tabel 5 Uji Determinasi**

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	17.27	1.00	17.24	0.00	15.30	19.24	15.30	19.24
19	0.71	0.06	11.50	0.00	<b>0.59</b>	<b>0.83</b>	<b>0.59</b>	<b>0.83</b>

Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)

Berdasarkan uji determinasi menunjukkan nilai kontribusi sebesar 0,83 atau memiliki skor diatas 0,5 sehingga pada komponen nilai determinasi dinyatakan positif.

**Tabel 6 Nilai Signifikansi Korelasi**

Model	Coefficients <sup>a</sup>											
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	17.184	1.004			17.121	.000						
TOTAL X	.717	.062	.564		11.588	.000	.564	.564	.564	1.000		1.000

a. Dependent Variable: TOTALLY

Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)

Bila memperhatikan output analisis regresi pada tabel *coefficient* di atas, nilai constant/intercept (a) diperoleh 1.004, nilai *slope*/koefisien regresi ( $\alpha_1$ ) diperoleh 0,062 dengan nilai sig 0,000. Dengan demikian, persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a_0 + b_0X = 1.004 + 0,062X.$$

Jika variabel bebas (X) naik satu satuan, maka variabel terikat (Y) dapat diprediksikan akan meningkat sebesar 0,062 pada konstanta 1.004. Melalui pengujian empat tahap yang dilakukan oleh peneliti pada uji regresi menunjukkan nilai skor secara keseluruhan positif. Sehingga disini pengujian antar dua variabel secara eksplanatif menunjukkan nilai skor yang saling terkait atau berhubungan satu sama lain. Bila dikaji dalam teori inokulasi menunjukkan bahwa pendekatan dalam persuasi yang bertujuan supaya orang-orang resisten terhadap alasan persuasif yang dicoba oleh orang lain. Dalam teori ini menjadi buat melindungi perilaku supaya tidak terjalin pergantian ataupun dengan kata lain buat membagikan perlawanan terhadap pengaruh perilaku, apakah pengaruh tersebut berbentuk serbuan langsung ataupun tekanan yang berkepanjangan. Bagi teori inokulasi, keahlian buat menolak persuasi yang ditetapkan oleh keahlian orang buat membantah alasan yang bertentangan dengan keyakinannya. Keahlian ini diasumsikan tergantung pada 2 aspek, ialah motivasi serta aplikasi. Sehingga pesan media

sangat berpotensi untuk membentuk sikap publik terutama terkait dengan sikap politik (Littlejohn, Stephen W. & Foss, 2016).

Adapun motif dan aplikasi dalam membentuk sikap responden di sini, peneliti menggunakan analisis faktor dengan jenis *confirmatory factor analysis* untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi sikap publik. Adapun dapat dilihat dari analisis berikut:

**Tabel 7 Tes KMO dan Bartlett**

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.893
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	3309.392
	Df	190
	Sig.	.000

Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)

Pengukuran distribusi data angka KMO and Bartlett's test adalah 0,893 dengan signifikan 0,000; karena angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikansi jaun dibawah 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga angka Sig.  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis dengan analisis faktor yang ditunjukkan dari Measure of Sampling Adequacy (MSA) berkisar 0 sampai 1 dengan kriteria  $MSA > 0,05$ , maka  $0,893 > 0,05$  variabel tersebut dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut.

Pada analisis faktor ditunjukkan terdapat 4 faktor yang paling besar variabel X mempengaruhi Variabel Y. Hal ini dapat dilihat dari tabel 8.

**Tabel 8 Hasil analisis faktor**

Total Variance Explained									
Compo nent	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
	1	7.317	36.583	36.583	7.317	36.583	36.583	6.774	33.870
2	2.496	12.478	49.061	2.496	12.478	49.061	2.388	11.938	45.807
3	1.879	9.397	58.458	1.879	9.397	58.458	2.356	11.778	57.586
4	1.332	6.658	65.116	1.332	6.658	65.116	1.506	7.530	65.116

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)

Berdasarkan dari keempat faktor ini kemudian dilihat pada nilai urutan Communalitiesnya. Nilai Komunalitas mengurutkan dari peringkat skor yang tertinggi sampai yang terendah kemudian diamati pada perhitungan 4 besar dari perhitungan nilai komunalitasnya. Peneliti melakukan filterisasi pada *component matrix* pada variabel yang memiliki nilai dibawah 0,5 atau 0,5 kebawah sehingga perlu dilakukan pengujian ulang pada

analisis faktor untuk menemukan nilai-nilai varians sebagai temuan faktor pada pengujian variabel tersebut.

**Tabel 9 Nilai Communalities**

No	Faktor	Initial	Extraction
1	Tidak Percaya Kepada Pemerintah	1.000	0,839
2	Kepentingan IKN	1.000	0,839
3	Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Sangat Tidak Efektif	1.000	0,742
4	Pemerintahan Tidak Berjalan dengan baik	1.000	0,728

Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)

Berdasarkan keempat faktor tersebut, faktor utama yang paling mempengaruhi sikap dari publik ini adalah rasa tidak percaya publik terhadap pemerintah terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode dan juga penundaan pemilu 2024 yang tidak mendapatkan respon positif dari publik.

Bila dijelaskan dalam teori inokulasi ini menunjukkan ada pengaruh isu yang beredar di media terkait perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode juga membentuk sikap publik terhadap isu tersebut. Adanya sikap responden, berdasarkan deskripsi data, menunjukkan bahwa responden begitu menghendaki adanya demokrasi dalam pemilihan Presiden termasuk dalam pemilihan umum. Menurut Adiprayitno, Demokrasi merupakan proses pengambilan keputusan kolektif melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil untuk memilih pemimpin politik. Jabatan itu, seperti halnya Presiden, tidak lain merupakan mandat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Bakti, 2017).

Responden juga tidak menyetujui dengan penundaan pemilu 2024. Adapun waktu penyelenggaraan pemilu diklaim memiliki pengaruh bagi sistem presidensial sehingga tempo penyelenggaraan pemilu dalam desain pemilu mesti di desain sedemikian rupa agar bisa memperkuat sistem presidensial. Terkait dengan klaim tersebut, menjelaskan keterkaitan antara desain pemilu serentak dengan sistem presidensial untuk menganalisis tentang pengaruh waktu penyelenggaraan pemilu bagi penguatan sistem presidensial di Indonesia.

Shugart menyatakan bahwa bahwa desain institusional pemilihan (*electoral cycle*) ikut mempengaruhi pembentukan pemerintahan. Oleh karena itu, desain penyelenggaraan pemilu semestinya dapat dirancang sedemikian rupa agar dapat menunjang terselenggaranya pemerintahan presidensial di Indonesia (Hanafi, 2021).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dengan menggunakan analisis data kuantitatif menggunakan statistik disini ditemukan bahwa terdapat pengaruh Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Di Media Massa Terhadap Sikap Publik. Hal ini terlihat di awal seperti hampir keseluruhan responden mengetahui tentang isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan mayoritas mengetahuinya melalui media massa dan media sosial. melalui hasil analisa ini pula responden juga menunjukkan bahwa mayoritas tidak

setuju dengan masa perpanjangan Presiden selama tiga periode dan juga tidak menyetujui bila pemilu harus ditunda. Hal ini beralasan tidak sesuai dengan konstitusi atau ketentuan hukum negara, dan juga faktor utama yang paling berpengaruh dari responden adalah rasa tidak percaya dengan pemerintah, kemudian ada pendapat responden yang menghubungkan kepentingan IKN di balik masa perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, selain itu tanggapan responden bahwa masa perpanjangan jabatan Presiden menunjukkan pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. & Zamzam, F. (2014). *Model Penelitian Kuantitatif. Berbasis SEM-AMOS* (1st ed.). Deepublish.
- Bakti, A. F. (2017). *Literasi Politik dan Kampanye Pemilu* (1st ed.). FIKOM UP Press.
- BPS. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html>
- CNN. (2022). *Survei: 45,3 Persen Ogah Jokowi tiga periode, Amendemen Mahal*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210605122602-617-650669/survei-453-persen-ogah-jokowi-3-periode-amendemen-mahal>
- Hanafi, R. I. (2021). *Partai Politik & Pemilu Serentak 2019. Kandidasi & Koalisi* (1st ed.). Buku Obor.
- Liliweri, A. (2011). *KOMUNIKASI. Serba Ada, Serba Makna* (1st ed.). Kencana Prenada Media.
- Littlejohn, S. W. & Foss, K. (2009). *Teori KOMunikasi (Theories of Human Communication)* (R. Oktafiani (ed.); 9th ed.). Salemba Humanika & Cengage Learning.
- Littlejohn, S. W. & Foss, K. (2016). *Ensiklopedia Teori Komunikasi* (1st ed.). Kencana Prenada Media.
- Louise A. J. (2021). Strategies of ideological polarisation in the online news media: A social actor analysis of Megawati Soekarnoputri. *Discourse and Society*, 32(1), 64–80. <https://doi.org/10.1177/0957926520961634>
- McQuails, D. (2010). *Teori Komunikasi Massa McQuail (McQuail's Mass Communication Theory)* (D. Opi (ed.); Edisi 6; B). Salemba Humanika.
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (E. T. Sofia (ed.); 7th ed.). Indeks.
- Ni'am, H. (2023). Pemilihan Umum 2024 Dan Wacana Tiga Periode: Perspektif Komunikasi Politik. In *SPEKTRUM* (Vol. 20, Issue 1, p. 1). Universitas Wahid Hasyim Semarang. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v20i1.7941>
- Perloff, R. M. (2007). *The Dynamics of Persuasion. Communication and Attitudes in the 21st Century* (4th ed.). Routledge.
- Pin, P., Siahaan, J. T. H., Nellya, B., & Bangun, M. (2021). Presiden Indonesia Tiga Periode. In *Jurnal Darma Agung* (Vol. 29, Issue 2, p. 267). Universitas Darma Agung. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1081>

- Rakhmat, J. & Ibrahim, I. S. (2017). *Metode Penelitian Komunikasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Rauf, M. A. A., & Rado, R. H. (2022). Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden tiga periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum. In *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* (Vol. 7, Issue 1, pp. 32–50). IAIN BONE. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i1.2054>
- Riadi, E. (2016). *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)* (A. Prabawati (ed.); 1st ed.). Penerbit Andi.
- Riady, R., & Syugiarto, S. (2022). Isu tiga periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* (Vol. 7, Issue 2, pp. 77–83). Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. <https://doi.org/10.52447/polinter.v7i2.5433>
- Santoso, S. (2018). *Mahir Statistik Multivariat dengan SPSS* (Santoso (ed.); 1st ed.). PT. Elex Media Komputindo.
- Saputra, R. W., & Claretta, D. C. (2023). Reception Analysis Masyarakat Surabaya terhadap Wacana Presiden tiga periode. In *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* (Vol. 3, Issue 2, pp. 639–647). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i2.2717>
- Silalahi, U. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif* (1st ed.). Refika Aditama.
- Siregar, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif. (Dilengkapi dengan perbandingan Perhitungan Manual & SPSS)* (Siregar (ed.); 1st ed.). Kencana Prenada Media.
- Sukimin, S. (2020). *Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>
- Supranto, J. (2018). *Statistik. Teori & Aplikasi* (A. Maulana (ed.); 8th ed.). Penerbit Erlangga.
- Tempo.co. (2022). *LSI: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Perpanjangan Masa Jabatan Presiden*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1566748/lsi-mayoritas-masyarakat-tak-setuju-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>
- Zaman, R. K., & Misnan, M. (2021). Infrastruktur Politik Menuju Pilpres 2024 Dalam Konstruksi Media Sosial. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.32509/petanda.v4i1.1558>